

Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Ferry Mursyidan Nugraha,
Ilmi Usrotin Choiriyah, M. AP

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Januari, 2025



PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan selalu berfokus pada pelayanan masyarakat umum demi meningkatkan kualitas kesehatannya, tanpa membedakan golongan (Qodriyatun, 2019).

Semua manusia pastinya sangat memerlukan pelayanan dalam bentuk apapun terutama pada hal kesehatan, karena kesehatan membuat seseorang terus produktif menjalani kehidupan sehingga setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terus-menerus diperlukan pembangunan di bidang kesehatan (Nainggolan et al., 2023).

Menurut organisasi dunia yakni (WHO) *World Health Organization* menjabarkan batasan usia dimulai dari usia pertengahan (*middle age*) antara 45 sampai usia 59 tahun, usia lanjut (*elderly*) diangka 60 sampai 74 tahun, dan usia lanjut tua (*old*) antara 75 mencapai 90 tahun, serta usia sangat tua disebut (*very old*) lebih dari 90 tahun.

Pemerintah menetapkan kebijakan berbentuk program yaitu Posyandu Lansia. Yang diatur:

- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1998
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2010

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Tabel 1. Penduduk Lanjut Usia Desa Kedung Banteng tahun 2022

| Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 45-49 | 91 | 73 | 164 |
| 50-54 | 82 | 82 | 164 |
| 55-59 | 19 | 27 | 46 |
| 60-64 | 18 | 34 | 52 |
| 65-69 | 25 | 26 | 51 |
| 70-74 | 2 | 1 | 3 |
| KedungBanteng | 237 | 243 | 480 |

Sumber: Pemerintah Desa Kedungbanteng, Tahun 2023

Pada tabel disamping dapat dilihat bahwa angka pra lansia maupun lansia cukup tinggi dengan jumlah laki- laki yaitu 237 orang dan perempuan 243 orang dengan total 480 orang. Karena angka pra lansia yang cukup tinggi tersebutlah yang membuat desa KedungBanteng melaksanakan Program Posyandu Lansia, yang memiliki kegiatan yaitu pendaftaran untuk mengikuti posyandu lansia, pencatatan KMS (Kartu Menuju Sehat) sebagai alat untuk mencatat dan memantau penyakit, mengukur tinggi badan dan berat badan., pengecekan tensi darah maupun cek gula darah, cek kolestrol, cek asam urat, pemberian makanan tambahan, pemberian obat dan pencatatan hasil timbang pada buku register

PENELITIAN TERDAHULU

| NO | Nama dan Tahun | Judul | Hasil |
|----|---------------------------|--|---|
| 1. | Sutmasa, (2021) | Implementasi Posyandu Lanjut Usia Di Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin | Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketidaksesuaian perlu diperbaiki. Ini termasuk kekurangan dana, sarana yang tidak memadai, dan kurangnya pengoptimalan kebijakan.. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi posyandu telah berkurang |
| 2. | Supriatini et al., (2020) | Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan yang diberikan oleh posyandu lansia kepada lanjut usia termasuk layanan kesehatan, makanan tambahan, olahraga, dan kegiatan non-kesehatan seperti aktivitas spiritual, arisan, kegiatan ekonomi produktif, penyebaran hobi, dan interaksi sosial dengan orang tua. |
| 3. | Hidayat, (2021) | Efektivitas Program Posyandu Lansia "Sehat Ceria" Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posyandu Lansia "Sehat Ceria" (Studi di RW 02) Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tidak memberikan layanan pencegahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa organisasi belum dibentuk dengan baik dan banyak orang tua yang tidak dapat mengikuti program menabung |

GAP PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil obesrvasi dilapangan terdapat beberapa permasalahan yakni:

1. Kurangnya tenaga kesehatan dan kader yang ada diposyandu lansia desa Kedungbanteng
2. Kurangnya dana dari desa untuk PMT Lansia (Pemberian Makanan Tambahan)
3. Kurangnya penyuluhan kesehatan terhadap lansia maupun keluarganya baik dari desa maupun pihak puskesmas serta pengawasan dan pengontrolan program yang kurang dari pihak puskesmas
4. Kurangnya fasilitas yang disediakan dan beberapa alat cek kesehatan yang masih prabayar

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN

Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR PENELITIAN

Teori Implementasi kebijakan menurut George Edward III

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

LOKASI PENELITIAN

Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Teknik Purposive Sampling

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

SUMBER DATA

1. Data Primer
2. Data sekunder

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif

Miles & Hubberman : 1. Pengumpulan data

2. Mereduksi data

3. Penyajian data

4. Penarikan kesimpulan

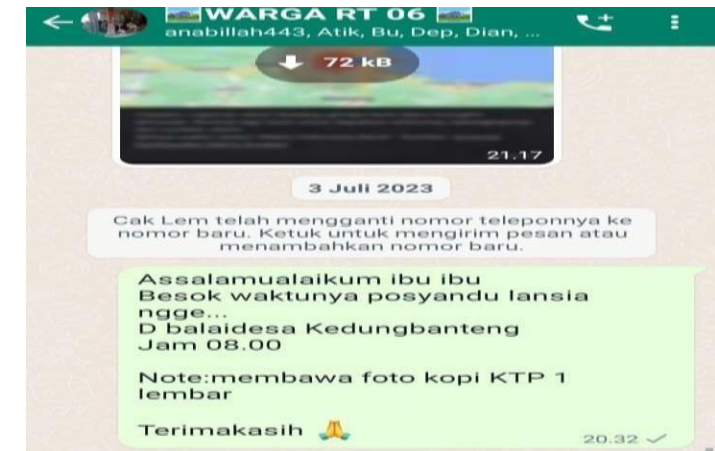
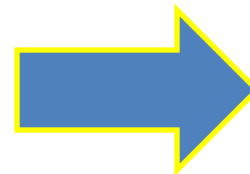
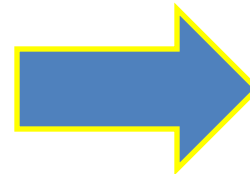
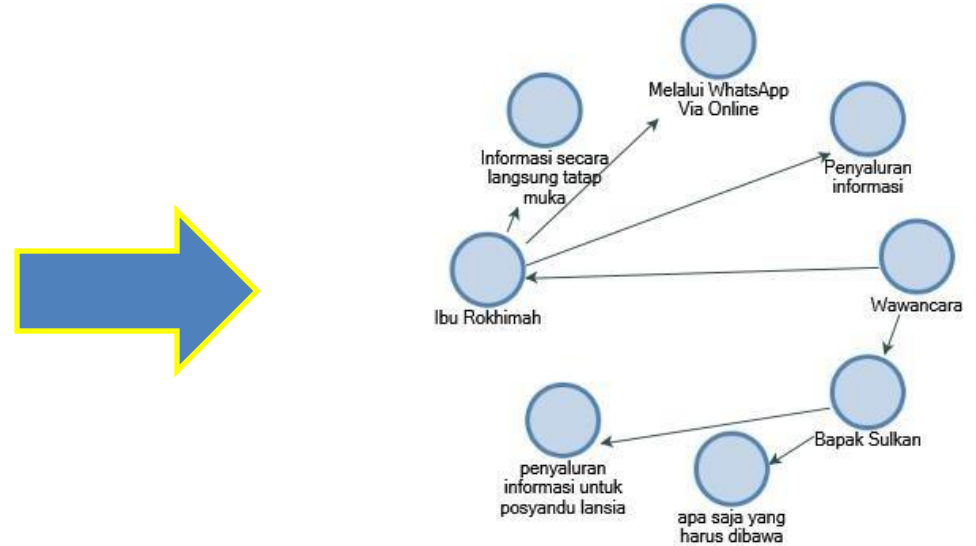
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KOMUNIKASI

Transmisi Komunikasi dan Kejelasan Informasi

Transmisi komunikasi, yaitu cara informasi disampaikan kepada publik. Hal ini dapat disimpulkan proses penyaluran informasi baik dari pihak puskesmas ke kader posyandu lansia dan kader posandu lansia kepada masyarakat lansia terkait pelaksanaan program posyandu lansia sendiri yaitu penyampaian secara tidak langsung melalui sosial media seperti Whatsapp atau melalui surat edaran, tidak hanya secara online tetapi penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kader posyandu lansia.

Selanjutnya terkait *kejelasan informasi* yakni penyampaian informasi melalui media whatsapp cukup jelas kepada lansia, tentang waktu, tempat dan persyaratan apa saja yang akan dibawa. Meski demikian, tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan lansia secara luas baik dari puskesmas atau desa yang berdampak besar terhadap partisipasi lansia sangat kecil pada program

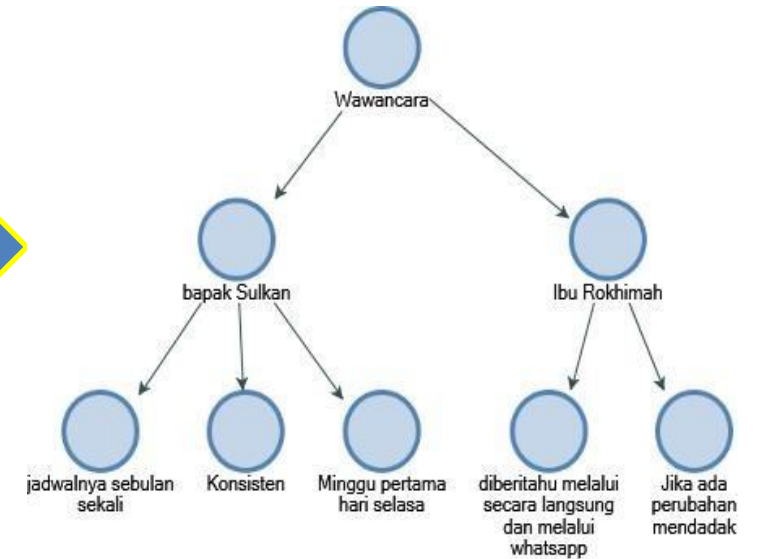
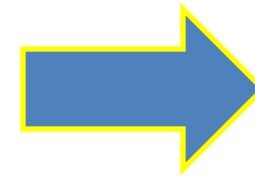


HASIL DAN PEMBAHASAN

KOMUNIKASI

Konsistensi Komunikasi

Konsistensi komunikasi sangat diperlukan agar informasi terkait kebijakan yang dibuat tidak membingungkan pelaksana, target grup, atau pihak yang berkepentingan (Nurlailah, 2021). Pada segi konsistensi dapat disimpulkan bahwa kader posyandu lansia sudah cukup konsisten terkait penyaluran informasi melalui via whatsapp atau secara langsung, pelaksanaan program posyandu lansia yang tidak berubah-ubah terkait tempat, waktu pelaksanaan dan persyaratan yang harus dibawa. Jika ada perubahan atau kendala mendadak seperti tenaga kesehatannya berhalangan hadir tetap konsisten diinformasikan melalui WhatsApp dan secara langsung tatap muka kepada masyarakat lansia



HASIL DAN PEMBAHASAN

2. SUMBERDAYA

Sumberdaya Manusia/Staf

Sumber Daya Manusia harus memadai serta mempunyai keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas. Dapat disimpulkan bahwa pada posyandu lanjut usia desa Kedungbanteng terjadi kekurangan sumber daya manusia, tenaga kesehatan yang hanya ada 2 tenaga kesehatan yang dimana pada Permenkes RI 67 Tahun 2015 disebutkan minimal adalah 5 tenaga kesehatan, tidak hanya itu kader posyandu lansia di desa Kedungbanteng hanya berjumlah 3, yang pada buku pedoman lanjut usia 2010 setidaknya kader sekitar 5.



| NO | Nama | Jabatan | Utusan |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. | Sugiyanti, Amd. Keb | Bidan | Puskesmas |
| 2. | Agung Prio Sasono Amd. Kep | Perawat | Puskesmas |
| 3. | Nurul Hidayati | Ketua Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |
| 4. | Lulu Mulyati | Sekretaris Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |
| 5. | Ainul Khasanah | Bendahara Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |
| 6. | Silvi Tita Sari | Kader Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |
| 7. | Siti Rokhimah | Kader Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |
| 8. | Indah Wati | Kader Posyandu Lansia | Desa Kedungbanteng |

Sumberdaya Anggaran

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya anggaran. Namun dapat disimpulkan yaitu meskipun dari desa sudah memberikan anggaran untuk posyandu lansia tetapi pada kenyataannya dana yang diberikan tersebut masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan di posyandu lansia desa Kedungbanteng terutama untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan).



| Kegiatan Anggaran | Sumber Anggaran | Jangka Anggaran | Tahun Anggaran | Pelaksana | Jumlah Anggaran |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| Posyandu Lanjut Usia | Dana Desa | 12 Bulan | 2022-2023 | TPK/PPKD | 21.000.000,00 |

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. SUMBERDAYA

Sumberdaya Fasilitas

Sumber daya fasilitas terdiri dari fasilitas fisik, yang merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan implementasi kebijakan. Pada Posyandu Lansia Kedungbanteng belum semua fasilitas tersebut tercukupi, seperti alat cek kesehatan masih berbayar, kekosongan obat sering terjadi di beberapa pertemuan, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan dari segi kurang lengkapnya fasilitas ini yang juga akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, karena apa yang dibutuhkan justru terbatas.

| NO | Jenis | Jumlah |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Ruang Pelayanan Di Kantor Desa (Outdoor) | 1 Aktif |
| 2. | Meja Pelayanan | 6 Meja |
| 3. | Kursi | 50-80 Kursi |
| 4. | Alat Tulis Kantor | 3-5 Pack |
| 5. | Wifi Kantor Desa | 1 Unit |
| 6. | Kamar Mandi | 1 |
| 7. | Dapur | 1 |
| 9. | Pengukur Tinggi badan | 1 Unit |
| 10. | Timbangan Badan Digital | 1 Unit |
| 11. | Tensimeter digital/alat tensi darah | 1 Unit |
| 12. | Easy Touch GCU | 1 Unit (Berbayar) |
| 13. | Buku Register Kohort Pelayanan Kesehatan | 1 Buku |
| 14. | Buku Kesehatan Lanjut Usia | 50-100 Buku |
| 15. | Obat-obatan | 10-15 Kotak |
| 16. | Makanan Tambahan/PMT | 80 |
| 17. | Minuman Tambahan | 4 Dus |

3. DISPOSISI

Disposisi adalah sifat para implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Dari faktor pengangkatan birokrasi diketahui bahwa pengabdian yang diberikan kader sangat baik hal ini dibuktikan dari semangat yang ditunjukkan kader yang selalu aktif, yang kedua adalah faktor insetif, sudah ada insetif yang diberikan pemerintah desa Kedungbanteng setiap pelaksanaan program posyandu lansia

TANDA TERIMA
POSYANDU LANSIA
BULAN MEI TAHUN 2023

| NO | NAMA PEKERJA | JUMLAH | PPH 21 | JUMLAH DITERIMA | TANDA TANGAN |
|--------|-----------------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1 | NURUL HIDAYATI | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 1 |
| 2 | AINUL KHASANAH | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 2 |
| 3 | SILVI TITA SARI | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 3 |
| 4 | INDAH WATI | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 4 |
| 5 | LULUK MULIYATI | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 5 |
| 6 | SITI ROKHIMAH | 50,000 | 3,000 | 47,000 | 6 |
| JUMLAH | | 300,000 | 18,000 | 282,000 | |

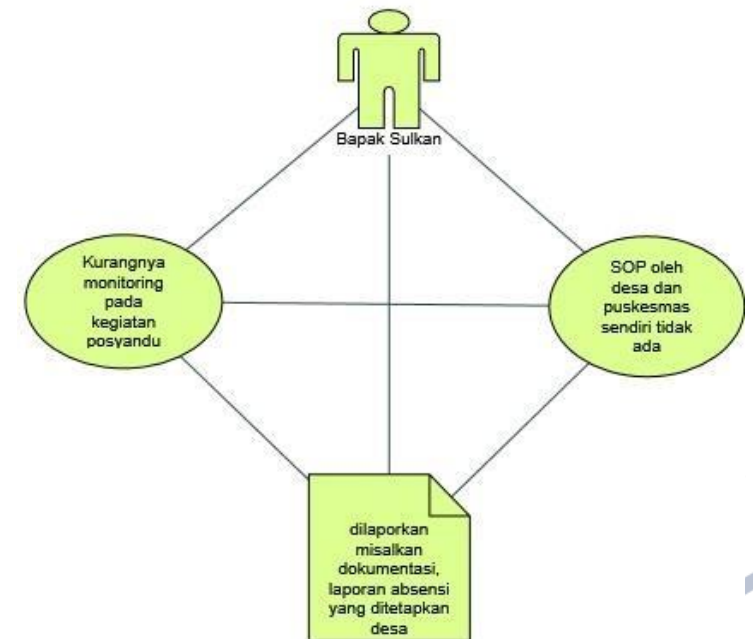
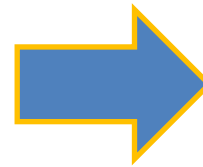
Mengetahui Kepala Desa: BUDIONO, S.Pd
Setuju Dibayar Koordinator PTPKD: NURUL ROHMAN
Kedungbanteng, Mei 2023
Lunas dibayar, Bendahara Desa: DIAN AMELPRIHATIN

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. STRUKTUR BIROKRASI

SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan bagi implementor atau pelaksana kebijakan dalam bekerja. Untuk menghindari ketimpangan tugas selama pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi harus ringkas, tidak berbelit, dan fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa kurang jelasnya SOP untuk pelaksanaan program posyandu lansia di desa Kedungbanteng sehingga tumpang tindih wewenang, penyebaran tanggung jawab yang kurang optimal



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang “Implementasi Program Posyandu Lansia Di Desa KedungBanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada indikator komunikasi yang berkaitan pada penyaluran suatu informasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi. Pada dimensi transmisi terkait pelaksanaan program posyandu lansia desa Kedungbanteng sudah cukup baik, dimana penyaluran informasi dari grup whatsapp kader serta secara langsung. Dari dimensi kejelasan komunikasi mengenai posyandu lansia telah disampaikan secara jelas, namun kejelasan informasi tersebut belum disampaikan melalui sosialisasi sehingga kurangnya sosialisasi dan kurangnya monitoring dari puskesmas Tanggulangin. Dari dimensi konsistensi komunikasi, kader posyandu lansia sudah sangat konsisten dimana penyaluran informasi terus dilakukandan tidak berubah- ubah. Pertama dari jumlah SDM masih sangat sedikit baik dari tenaga kesehatan maupun kader posyandu lansia hanya. Kedua dari sumberdaya anggaran posyandu lansia masih kurangnya anggaran terutama untuk Pemberian Makanan Tambahan. Ketiga terkait sumberdaya fasilitas, untuk sarana-prasarana yang sudah disediakan namun untuk fasilitas kesehatan dari puskesmas seperti obat-obatan yang sering terjadi kekosongan dan beberapa alat kesehatan masih prabayar Berkaitan dengan disposisi, dapat dilihat dari pengabdian yang cukup baik, berdedikasi aktif dan bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah program sebagai bentuk pelayanan dan terus memberikan informasi. Dari faktor pemberian insetif diketahui sudah adanya anggaran yang dikhususkan untuk insetif para kader. Dapat diambil kesimpulan dari segi Struktur birokrasi pada bagian SOP, bahwa kurang jelasnya SOP yang digunakan maupun yang diterapkan oleh desa Kedungbanteng maupun puskesmas Tanggulangin,.

REFERENSI

- [1] Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>.
- [2] Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16.
- [3] Dharma, A. B., Susanti, D., & Marlinda, P. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah Di Kota Dumai. *Sebatik*, 27(1), 145–154. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2098>
- [4] Nuramalia, S., Dedi, A., Yuliani, D., Galuh, U., & Stunting, P. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. repository.unigal.ac.id. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1089>
- [5] Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik. Humanities*
- [6] Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan. *1*, 1–100.
- [7] Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-al>
- [8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022,” pp. 6–480, 2022.
- [9] Solichin, A. W. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In *Bumi Akasara*, Jakarta. books.google.com.
- [10] Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- [11] Supriatini, S., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(3). <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i3.5400>
- [12] Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>

REFERENSI

- [13] Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 6, Issue 2, p. 324). <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- [14] Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa. In *Journal of Business Management Education* (Vol. 6, Issue 3, pp. 11–21).
- [15] Kurniawan, C., & Suswanta, S. (2022). Implementation of Artificial Intelligence by the Government of West Nusa Tenggara (NTB) in Disaster Management. *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*, 209(Iconpo 2021), 39–44.
- [16] Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 8–17. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.201>
- [17] Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. In *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* (Vol. 6, Issue 1). jurnal.iicet.org. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- [18] Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- [19] Iman, N., Usman, N., & Bahrin, B. (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar dalam Menghadapi Asasmen Kompetensi Minimum. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 6(2), 250.
- [20] Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68.
- [21] Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). In *Accounting Unipa* (Vol. 1, Issue 1, pp. 20–34).
- [22] Putra, I. M. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Program Pro Denpasar Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 261. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2211>
- [23] Kumalasari, K. P., Dewanti, D., Egalita, F. F., & ... (2022). Analisis Implementasi Skema Dual Resident Entities Di Indonesia. *Profit: Jurnal ...*, 2, 191–208.

REFERENSI

- [24] Andi Yulia Kasma, Andi Ayumar, and Kartina Nur, “Evaluasi Pelaksanaan Program Posyandu Lansia Di Puskesmas Batua Makassar,” *J. Mitrsehat*, vol. 9, no. 1, pp. 451–458, 2019, doi: 10.51171/jms. v9i1.215.
- [25] Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Wijaya, S. S. (2019). Implementasi Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2),
- [26] Dimhari, A. (2022). Implementasi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah Di Smpn 3 Doplang Kabupaten Blora. *E-Jurnal Unisri*, 11(1), 1–14.
- [27] Hasanah, S., Pratama, I. N., Rahmat, A. F., & Kurniawan, C. (2023). Digital Government in Social Sciences Discipline: Mapping Pivotal Features and Proposed Theoretical Model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 195–220.
- [28] Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- [29] Ristarnado, R., Settyoko, J., & Harpinsyah, H. (2019). Strategi pemerintahan desa dalam mengembangkan pariwisata. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.4>
- [30] Repi, O. M. D., Ratu, J., Oematan, G., & Roga, A. U. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Posyandu Lansia Di Kecamatan Nunpene. *Jurnal Ners*, 7(1), 757–761. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13745>
- [31] Hasibuan, M. R. S., Badaruddin, & Amin, M. (2021). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 578–598.
- [32] Puspitasari, Beti, (2022). Implementasi program posyandu lansia melati desa toyogo kecamatan sumbangmacan Kabupaten sragen, *Solidaritas: jurnal ilmu ilmu sosial*
- [33] Watrianthos, R., Nasution, A. P., & ... (2019). Model e-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah*
- [34] Kurniadi, D., & Effendy, K. (2019). Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantasingingi Provinsi Riau. *Daerah DiIndonesia*, 11(4), 569–578.



UMSIDA

DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI